

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Rotasi Pegawai di lingkungan LKPP, dipandang perlu menetapkan kembali Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Angga Widita Amirul, S.E. NIP. 19840726 201012 1 001 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat
2.	Arso Hadi Wardono, S.E. NIP. 19821216 201012 1 001 Kepala Subbagian Pemantuan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Rita Agustini Sumardi, A.Md NIP. 19780813 201012 2 001 Penelaah Bahan Tata Usaha	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan

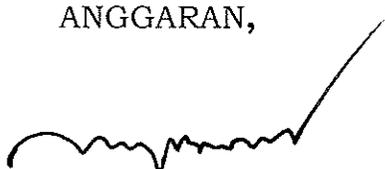
No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
4.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Desi Kartika, S.H. NIP. 19891212 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Ketsia Aprilianny Laya, S.T.P NIP. 19850416 201012 2 001 Kepala Seksi Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
8.	Eva Nurdinna Agustini, A.Md. NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Febrita Sidabalok, S.T NIP. 19810202 201402 2 001 Penelaah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Sugianto, S.T NIP. 19820408 201012 1 001 Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
11.	Anita Carollin, S.Sos NIP. 19810928 201012 2 001 Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
12.	Umi Nurnaeni, S.Psi NIP. 19780202 201012 2 001 Kepala Seksi Pengajar Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
13.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi dan Survailen	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Lintong Janji Natogu Sinambela, S.E. NIP. 19820424 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
15.	Ratna Ayu Maruti, S.I.P NIP. 19870325 201012 2 001 Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
16.	Linda Mikowati, S.TP NIP. 19870726 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.